

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Deskripsi Data**

**4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penting yang diperoleh dengan memanfaatkan penjelasan (survey) yang telah disebarluaskan secara langsung kepada responden di 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Penyebarluasan survei dilakukan pada 11 Juni 2023 hingga 12 Agustus 2023

**Tabel 4.1**  
**Kuisisioner Disebar dan Kembali**

<b>No</b>	<b>Nama Dinas</b>	<b>Kuisisioner Disebar</b>	<b>Kuisisioner Kembali</b>
1.	Dinas Penanaman Modal	3	3
2.	Dinas Tenaga Kerja	3	3
3.	Dinas Perindustrian	3	3
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	3
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3	3
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	3	3
7.	Dinas Perdagangan	3	3
8.	Dinas Komunikasi & Informasi	3	3
9.	Dinas Koperasi & Ukm	3	3
10.	Dinas Kependudukan & sipil	3	3
11.	Dinas Pemukiman & Perumahan	3	0
12.	Dinas Sosial	3	0
13.	Dinas Pariwisata	3	3
14.	Dinas Pengendalian penduduk & kb	3	3
15.	Dinas Pertanian	3	0
16.	Dinas Kesehatan	3	0
17.	Dinas Pangan	3	0
18.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	0

19.	Dinas Perhubungan	3	0
20.	Dinas Pekerjaan Umum	3	3
21.	Dinas Lingkungan Hidup	3	3
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	3
23.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	0
Jumlah		69	45

Pada table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 15 populasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung, ada 8 Organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Bandar Lampung yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Dikarenakan 8 OPD Kota Bandar Lampung tidak memberikan izin untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini. Sedangkan 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung mengizinkan sehingga jumlah kuesioner menunjukkan jumlah sample yang sudah memenuhi kriteria penelitian :

**Tabel 4.2 Deskripsi Kuesioner Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang disebarkan	69	100%
Kuesioner yang kembali	45	65,22%
Kuesioner yang gugur	24	34,78%
Kuesioner yang dapat digunakan	45	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Data tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa tingkat kuesioner yang kembali adalah 65,22%. Total kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 65,22% atau 45 kuesioner yang disebar.

**Tabel 4.3 Data Responden**

N0	Jenis kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Jenis kelamin	Laki-laki	16	35,56
		Perempuan	29	64,44
2	Usia	21-30 Tahun	30	66,67
		31-40 Tahun	13	28,89
		41-50 Tahun	2	4,44
		50+ tahun	0	0
3	Pendidikan Terakhir	D3	0	0
		S1	26	57,78

	S2	19	42,22
	S3	0	0

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa 16 responden atau 35,56% responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, dan sebesar 29 orang atau 64,44% berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan umur responden terlihat bahwa umur responden 21-30 tahun berjumlah 30 responden atau sebesar 66,67%, umur responden 31-40 tahun berjumlah 13 responden atau sebesar 28,89%, dan umur responden 41-50 tahun berjumlah 2 responden atau sebesar 4,44%. Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden terlihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 26 responden atau sebesar 57,78%, dan pendidikan terakhir S2 berjumlah 19 responden atau sebesar 42,22%.

## 4.2 Hasil Uji Persyaratan Instrumen

### 4.2.1 Variabel Akuntabilitas Publik

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Akuntabilitas Publik diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Publik**

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Alpha	Kesimpulan
1	0.761	0,05	Valid
2	0.781	0,05	Valid
3	0.709	0,05	Valid
4	0.775	0,05	Valid
5	0.754	0,05	Valid

Sumber: Data Lampiran 3, diolah. 2023.

Tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Akuntabilitas Publik dengan 5 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai korelasi semua komponen  $> 0,5$  maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk dianalisis.

### 4.2.2 Variabel Transparansi Publik

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Transparansi Publik diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Publik**

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Alpha	Kesimpulan
1	0.775	0,05	Valid
2	0.740	0,05	Valid
3	0.589	0,05	Valid
4	0.733	0,05	Valid
5	0.401	0,05	Valid

Sumber: Data Lampiran 3, diolah. 2023.

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Transparansi Publik dengan 5 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai korelasi semua komponen  $> 0,5$  maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk dianalisis.

#### 4.2.3 Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Fungsi Pemeriksaan Intern**

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Alpha	Kesimpulan
1	0.489	0,05	Valid
2	0.712	0,05	Valid
3	0.690	0,05	Valid
4	0.692	0,05	Valid
5	0.731	0,05	Valid

Sumber: Data Lampiran 3, diolah. 2023.

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran dengan 5 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai korelasi semua komponen  $> 0,5$  maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk merangkum ketujuh variabel yang dianalisis.

#### 4.2.4 Variabel Fungsi Pemeriksaan Intern

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Fungsi Pemeriksaan Intern diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran**

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Alpha	Kesimpulan
1	0.760	0,05	Valid
2	0.778	0,05	Valid
3	0.858	0,05	Valid
4	0.668	0,05	Valid
5	0.799	0,05	Valid

Sumber: Data Lampiran 3, diolah. 2023.

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Fungsi Pemeriksaan Intern dengan 5 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai korelasi semua komponen  $> 0,5$  maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk merangkum ketujuh variabel yang dianalisis.

#### 4.2.4 Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap variabel Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pemerintah Daerah**

Item Pertanyaan	Nilai Korelasi	Alpha	Kesimpulan
1	0.739	0,05	Valid
2	0.613	0,05	Valid
3	0.751	0,05	Valid
4	0.782	0,05	Valid
5	0.776	0,05	Valid
6	0.588	0,05	Valid
7	0.685	0,05	Valid

Sumber: Data Lampiran 3, diolah. 2023.

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah dengan 7 pernyataan diperoleh hasil *component transformation matrix* menunjukkan bahwa semua nilai korelasi semua komponen  $> 0,5$  maka faktor yang terbentuk dapat disimpulkan layak untuk dianalisis.

#### 4.2.5 Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25.0 diperoleh hasil pengujian reliabilitas kuesioner digunakan dengan menggunakan *Alpha*. Hasil uji reliabilitas dikonsultasikan dengan daftar nilai r alpha indeks korelasi :

**Tabel 4.9**  
**Interprestasi Nilai r Alpha Indeks Kolerasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Tinggi
0,800 – 1,000	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel 4.9 ketentuan reliabel diatas, maka dapat dilihat hasil pengujian sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Tingkat Hubungan	Kriteria
Akuntabilitas Publik	0, 813	Tinggi	Reliabel
Transparansi Publik	0, 651	Tinggi	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0, 665	Tinggi	Reliabel
Fungsi Pemeriksaan Intern	0, 832	Tinggi	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	0, 826	Tinggi	Reliabel

Sumber: Data Lampiran 4, diolah. 2023.

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa hasil uji reliabilitas variabel Akuntabilitas Publik (X1) adalah sebesar 0,794, variabel Transparansi Publik (X2) sebesar 0,660, variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) sebesar 0,693, Fungsi Pemeriksaan Intern (X4) sebesar 0,783 dan variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 0,729. Kesimpulan dari uji reliabilitas dari seluruh variabel adalah bahwa seluruh variabel memiliki tingkat hubungan sangat tinggi. Hal tersebut dapat diartikan pula bahwa keempat variabel tersebut dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

#### **4.4 Hasil Asumsi Klasik**

##### **4.4.1 Hasil Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah data yang digunakan terdistribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan histogram, pendekatan grafik, dan uji *olmogorov-smirnov*. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25.

Rumusan hipotesis:

1.  $H_0$  : Data terdistribusi normal.

2.  $H_a$  : Data terdistribusi tidak normal.

Dengan kriteria:

1. Jika probabilitas (sig) > 0,05 (alpha) maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

2. Jika probabilitas (sig) < 0,05 (alpha) maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima.

Berdasarkan uji *One-sample Kolmogorov Smirnov* yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil uji Normalitas Menggunakan Uji One sample Kolmogorov Smirnov**

		Unstandardized
		Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.53374412
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.095
	Negative	-.089
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil data diolah tahun 2023

Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh melalui uji *One-Sample Kolmogorov Smirnov* adalah sebesar 0,095. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,200) tersebut lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau seluruh data residual berdistribusi normal.

#### 4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang cukup kuat diantara variabel independennya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23.313	1.643		14.189	.000		
	Akuntabilitas Publik	.444	.036	.846	12.449	.000	.926	1.079
	Transparansi Publik	-.232	.041	-.369	-5.625	.000	.993	1.007
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.018	.046	-.026	-.382	.705	.927	1.078
	Fungsi Pemeriksaan Intern	-.049	.037	-.087	-1.323	.193	.980	1.021

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil data diolah tahun 2023

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10, dan nilai tolerance diatas 0,1 maka data yang digunakan bebas dari multikolinearitas.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas, cara yang paling sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak yaitu hanya dengan melihat pada Scatter Plot. Selain dengan melihat pada Scatter Plot, ada beberapa metode statistik yang dapat digunakan untuk uji heteroskedastisitas, seperti halnya uji Glejser. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menguji terjadi heteroskedastisitas atau tidak adalah dengan menggunakan uji Glejser. Pada uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser ini, apabila nilai Sig. (signifikansi) dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik ( $p > 0,05$ ), maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.308	.837		.368	.715
	Akuntabilitas Publik	.007	.018	.057	.360	.720
	Transparansi Publik	-.011	.021	-.078	-.503	.618
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.010	.024	-.065	-.410	.684
	Fungsi Pemeriksaan Intern	.025	.019	.203	1.312	.197

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Hasil data diolah tahun 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai Sig. dari Akuntabilitas Publik sebesar 0.720, Transparansi Publik sebesar 0.618, Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 0.684, dan Fungsi Pemeriksaan Intern sebesar 0.197, maka dapat disimpulkan, bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing variabel tidak signifikan, atau nilai Sig. lebih besar dari 0.05.

#### 4.5 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear berganda

Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel sebagai indikatornya yaitu Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Publik (X2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), Fungsi Pemeriksaan Intern (X4) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.

1	(Constant)	23.313	1.643		14.189	.000
	Akuntabilitas Publik	.444	.036	.846	12.449	.000
	Transparansi Publik	-.232	.041	-.369	-5.625	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.018	.046	-.026	-.382	.705
	Fungsi Pemeriksaan Intern	-.049	.037	-.087	-1.323	.193

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah  
*Sumber : Hasil data diolah tahun 2023*

Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS sebagai berikut: konstanta  $a = 23.313$ , koefisien  $b_1 = 0.444$ ,  $b_2 = -0.232$ ,  $b_3 = -0.018$ , dan  $b_4 = -0.049$  sehingga persamaan regresi yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 23.313 + 0.444 X_1 - 0.232 X_2 - 0.018X_3 - 0.049X_4$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Pemerintah Daerah  
a = Konstanta  
b = Koefisien Regresi  
e = *Error* / unsur kesalahan  
X1 = Akuntabilitas Publik  
X2 = Transparansi Publik  
X3 = Kejelasan Sasaran Anggaran  
X4 = Fungsi Pemeriksaan Intern

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien konstanta dalam hal ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah akan tetap sebesar 23.313 dengan anggapan apabila variabel lainnya konstan.
2. Nilai koefisien Akuntabilitas Publik bernilai positif. Artinya terdapat pengaruh positif Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Akuntabilitas Publik, maka akan meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan catatan kondisi lain dianggap tetap ( *Ceteris Paribus*).
3. Nilai koefisien Transparansi Publik bernilai negatif. Artinya terdapat pengaruh negatif Transparansi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Akuntabilitas Publik, maka akan menurunkan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan catatan kondisi lain dianggap tetap (Ceteris Paribus).

4. Nilai koefisien Kejelasan Sasaran Anggaran bernilai negatif. Artinya Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Kejelasan Sasaran Anggaran, maka semakin menurunkan tingkat Kinerja Pemerintah Daerah, dengan catatan kondisi lain dianggap tetap (Ceteris Paribus).
5. Nilai koefisien Fungsi Pemeriksaan Intern bernilai negatif. Artinya Fungsi Pemeriksaan Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Fungsi Pemeriksaan Intern, maka semakin menurunkan tingkat Kinerja Pemerintah Daerah, dengan catatan kondisi lain dianggap tetap (Ceteris Paribus).

#### 4.6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil uji koefisien regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 <sup>a</sup>	.829	.812	.560

- a. Predictors: (Constant), Fungsi Pemeriksaan Intern, Transparansi Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik
- b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah
- Sumber : Hasil data diolah tahun 2023*

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,910 artinya tingkat hubungan antara Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Publik (X2), Kejelasan Sasaran Anggaran (X3), dan Fungsi Pemeriksaan Intern (X4) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah positif. Koefisien determinan  $R^2$  (R Square) sebesar 0,829 artinya bahwa Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dijelaskan oleh Akuntabilitas Publik (X1), Transparansi Publik (X2), dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) sebesar 0,829 atau 82,9%, sedangkan sisanya sebesar 17,1% dijelaskan oleh faktor/variabel lain diluar penelitian ini.

#### 4.7 Hasil Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi antara konstanta dengan variabel independent. Berdasarkan pengolahan data uji t diperoleh data sebagai berikut:

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak
2. Bila nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.

Uji parsial atau uji t dalam analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai t hitung  $>$  t tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai t-hitung  $<$  t-tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai Sig  $<$  0,05 maka variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai Sig  $>$  0,05 maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji-t dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Hipotesis**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.313	1.643		14.189	.000
	Akuntabilitas Publik	.444	.036	.846	12.449	.000
	Transparansi Publik	-.232	.041	-.369	-5.625	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.018	.046	-.026	-.382	.705
	Fungsi Pemeriksaan Intern	-.049	.037	-.087	-1.323	.193

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber : Hasil data diolah tahun 2023

1. Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Akuntabilitas Publik (X1) dengan nilai  $t_{hitung}$  12.449 >  $t_{tabel}$  2.014 dan nilai signifikansi  $0.000 < 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 1 diterima.
2. Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Transparansi Publik (X2) dengan nilai  $t_{hitung}$  -5.625 <  $t_{tabel}$  2.014 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 2 diterima.
3. Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) dengan nilai  $t_{hitung}$  -0.382 <  $t_{tabel}$  2.014 dan nilai signifikansi  $0,705 > 0,05$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 3 ditolak.
4. Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Fungsi Pemeriksaan Intern (X3) dengan nilai  $t_{hitung}$  -1.323 <  $t_{tabel}$  2.014 dan nilai signifikansi  $0,193 > 0,05$ , maka  $H_o$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Fungsi Pemeriksaan Intern

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 3 ditolak.

#### **4.8 Pembahasan**

##### **1. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.**

Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Akuntabilitas Publik (X1) dengan nilai  $t_{hitung}$  12.449 >  $t_{tabel}$  2.014 dan nilai signifikansi  $0.000 < 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 1 diterima. Artinya, akuntabilitas memiliki dampak positif yang signifikan bagi kinerja anggaran Pemkot Bandar Lampung. Koefisien regresi dengan arah positif mengartikan bahwa, setiap adanya peningkatan akuntabilitas dari setiap OPD di unit kerja Kota Bandar Lampung akan berdampak pada kinerja anggaran yang lebih baik.

Hasil penelitian sejalan dengan *stewardship theory*, dalam konsep *stewardship theory* dijelaskan tentang individu (pemerintah) tidak termotivasi oleh kepentingan sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai kinerja yang maksimal. Dengan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemkot Bandar Lampung menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung (*steward*) telah berupaya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Seperti yang telah dikatakan oleh Jefri (2018) bahwa kinerja pemerintah yang berhasil pada umumnya telah memenuhi keinginan masyarakatnya.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang sebelumnya telah direncanakan. Prinsip dari akuntabilitas yaitu, publik (masyarakat) berhak mengetahui kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan (pemerintah). Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat (Anggraini et al, 2021). Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah untuk memberikan penjelasan serta menjawab segala hal yang berkaitan

dengan langkah-langkah, segala keputusan, dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penelitian sejalan dengan temuan Harnovinsah et al (2020), Achmad et al (2020), serta Laoli (2019). Dalam temuan penelitiannya dikatakan bahwa akuntabilitas mempunyai dampak yang signifikan positif bagi kinerja anggaran. Akuntabilitas menjadi ukuran yang akan menentukan arah kinerja anggaran. Sehingga, dengan adanya akuntabilitas akan mendorong kinerja anggaran yang positif dengan hasil kinerja yang ekonomis, efisien, dan efektif dalam pembangunan daerah.

## **2. Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.**

Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Transparansi Publik (X2) dengan nilai  $t_{hitung} -5.625 < t_{tabel} 2.014$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Transparansi Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 2 diterima. Artinya, transparansi anggaran memiliki dampak positif yang signifikan bagi kinerja anggaran Pemkot Bandar Lampung. Koefisien regresi dengan arah positif mengartikan bahwa, setiap adanya peningkatan transparansi anggaran pada setiap OPD di unit kerja Kota Bandar Lampung akan berdampak pada kinerja anggaran yang positif dan lebih baik.

Mengacu pada hipotesis yang diajukan, maka dinyatakan hipotesis pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran telah terbukti. Berdasarkan perspektif *stewardship theory*, transparansi anggaran digunakan oleh pemerintah (*steward*) untuk memberikan rasa tanggungjawab dan mengungkapkan seluruh aktivitas (*program*) pemerintah kepada masyarakat (*publik*). Transparansi anggaran akan memudahkan masyarakat untuk menilai terkait anggaran dan program yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang transparan menggambarkan kinerja anggaran yang baik (Schillemans dan Bjurstrøm, 2019). Dengan demikian hasil penelitian sejalan dengan *stewardship theory*.

Transparansi berarti keterbukaan yang menyeluruh dan memberi informasi

pada lapisan masyarakat secara utuh tentang fungsi anggaran dalam pemerintahan., dengan adanya transparansi anggaran berdampak positif bagi kepentingan publik. Terdapat beberapa manfaat dari adanya transparansi anggaran, diantaranya meliputi: 1) Pencegahan korupsi, 2) Dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dari kebijakan penggunaan anggaran, 3) Meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah, 4) Meningkatkan kohesi sosial (Temalagi et al, 2022).

Hasil penelitian sejalan dengan temuan Jeriansyah dan Mappanyukki (2020), Achmad et al (2020), serta Schillemans dan Bjurstrøm (2019). Dalam temuan penelitiannya mereka mengatakan bahwa transparansi anggaran mempunyai dampak yang signifikan positif bagi kinerja anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, serta mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik korupsi.

### **3. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.**

Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X3) dengan nilai  $t_{hitung} -0.382 < t_{tabel} 2.014$  dan nilai signifikansi  $0,705 > 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 3 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Solichin (2016) yang mengungkapkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Putra (2016) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.



#### 4. Fungsi Pemeriksaan Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 4.15 di atas menjelaskan bahwa variabel Fungsi Pemeriksaan Intern (X3) dengan nilai  $t_{hitung} -1.323 < t_{tabel} 2.014$  dan nilai signifikansi  $0,193 > 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Fungsi Pemeriksaan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, dengan demikian hipotesis 3 ditolak.

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini maka dapat dikatakan  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak dengan demikian maka penyebab fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah fungsi pemeriksaan intern berbicara tentang hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan SKPD. SKPD memiliki Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi SKPD yang tersedia secara lengkap, kini, dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, SKPD telah bertindak sebagai pemerintahan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). SKPD mengidentifikasi masalah analisa dan evaluasi dilakukan secara independen dan konstruktif dengan pemberian pendapat apabila diperlukan. Pemeriksaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila di pandang perlu direkomendasi. Pemeriksaan atas keuangan negara dapat dilakukan oleh pemeriksaan intern dan pemeriksa eksteren pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan, dan pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada suatu standar pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan atau dilengkapi dengan pemeriksaan akan tetapi tidak setiap kegiatan pengawasan harus dilakukan melalui pemeriksaan, seperti pengawasan yang dilakukan antara lain oleh DPR dan masyarakat. Satuan kerja atau instansi yang berada dan dibentuk didalam dan merupakan bagian organisasi pemerintah. Pemeriksaan intern pemerintah berfungsi utama membentuk

pimpinan pemerintah, melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk pengendalian akuntansi dan melaporkannya kepada pimpinan pemerintah pusat di daerah (Ratnawati dan Arnold, 2011).

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya juga dengan penelitian terdahulu oleh Kiri & Handayani (2021) menjelaskan bahwa fungsi pemeriksaan intern memiliki tidak pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pemeriksaan internal yang baik akan menghasilkan kinerja institusi yang lebih tinggi.